



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PERUBAHAN RENJA  
TAHUN 2025

Jalan Surohadikusumo No. 1 Pemalang  
Kode Pos (52312  
Telp/Fax (0284) 324657



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
NOMOR : 100.3.3 / / TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang;
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
  - b. bahwa guna merumuskan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025, untuk ketertiban, kelancaran, dan keberhasilan pelaksanaannya perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Penyusun

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2025;

Mengingat;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
21. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025;
22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2025, dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun agenda kerja;
  - b. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam Perubahan Rencana Kerja;
  - c. menyusun dan menyajikan rancangan awal perubahan rencana kerja Tahun 2025;
  - d. menyusun dan menyajikan rancangan perubahan rencana kerja Tahun 2025; dan
  - e. merumuskan rancangan akhir perubahan rencana kerja Tahun 2025.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang,  
pada tanggal 22 Juli 2025

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN PEMALANG,**



**TANTRI ARI CAHYANINGTYAS, S.H., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700322 199403 2 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 100.3.3 / /TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025

**SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS  
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025**

NO	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Anggota
4.	Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Anggota
5.	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Anggota
6.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
7.	Pengolah data dan Informasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Endah Tri Yuniati, A.Md. Ak.)	Anggota

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN PEMALANG,



TANTRI ARI CAHYANINGTYAS, S.H., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700322 199403 2 003

## KATA PENGANTAR

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025 yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2025 sampai dengan triwulan II serta perubahan rencana kerja dan pendanaan.

Perubahan Renja disusun untuk memberikan gambaran arah kebijakan, tujuan, sasaran, program kerja serta kegiatan organisasi yang akan dicapai setelah disesuaikan dengan dinamika yang terjadi selama tahun berjalan.

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang menjadi pedoman dalam melaksanakan program, kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan.

Pemalang, 2025  
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Pemalang



TANTRI ARI CAHYANINGTYAS, S.H., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700322 199403 2 003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Landasan Hukum .....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-6
1.4 Sistematika Penulisan .....	I-6
<b>BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II</b>	
<b>TAHUN 2024</b> .....	<b>II-7</b>
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>III-40</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>IV-51</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Status Capaian Kinerja dan Anggaran .....	II-9
Tabel 2.2 Evaluasi Renja Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan II Dinpusarda .....	II-10
Tabel 2.3 Evaluasi Indikator Kinerja Dinpusarda Kabupaten Pematang Triwulan II Tahun 2024 .....	II-23
Tabel 3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinpusarda pada Perubahan APBD Kabupaten Pematang Tahun 2024 .....	III-32

T. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN PEMALANG

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Pembangunan merupakan proses dinamis yang disesuaikan dengan permasalahan dan isu strategis yang ada. Dinamika kondisi perekonomian dan adanya kebijakan daerah yang membutuhkan penyesuaian, menyebabkan perencanaan pembangunan perlu disesuaikan juga. Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan Pengesahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 melalui Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2025. Sehubungan adanya perkembangan, terutama penyesuaian terhadap proyeksi kerangka ekonomi makro daerah, proyeksi kerangka pendanaan, pemanfaatan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya, penyesuaian terhadap kebijakan nasional dan perkembangan kebutuhan masyarakat, maka Peraturan Bupati tersebut perlu disesuaikan. Saat ini telah terbit Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dijadikan sebagai dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu disusun Perubahan Renja Tahun 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Pematang Jaya. Perubahan Renja tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Perubahan RKPD Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2025 dilakukan untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2025-2029 serta program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Adapun prioritas dan fokus pembangunan daerah yang diangkat dalam Perubahan RKPD tahun 2025 adalah **“Percepatan Pembangunan melalui Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, Inovasi dan Teknologi untuk Meningkatkan Perekonomian dan Daya Saing Daerah”**. Untuk diketahui bahwa Perubahan RKPD Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2025 diarahkan untuk perubahan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional, antara lain:

1. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan;
2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
3. Pencegahan Stunting dan kemiskinan ekstrim;
4. Pengendalian Inflasi di daerah;
5. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
6. Dukungan swasembada pangan; dan
7. Pengembangan industri kerajinan dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan pada hal tersebut, maka pada tahun 2025 perlu disusun perubahan terhadap Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Jaya tahun 2025 karena :

1. Penyesuaian belanja daerah karena realisasi SiLPA lebih tinggi dari proyeksi yang digunakan dalam penyusunan APBD Tahun 2025 dan adanya proyeksi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025;
2. Penyesuaian target kinerja kegiatan Perangkat Daerah di tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2025.

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan
  - Pengumpulan materi hasil evaluasi capaian Renja sampai dengan triwulan II tahun 2025

- Pengumpulan materi perubahan RKPD tahun 2025
2. Penyusunan rancangan
    - Dilakukan setelah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang menerima Surat Edaran Bupati Pemalang Nomor: B/000.7.2/347/Bappeda/2025 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Kabupaten Pemalang.
    - Penyusunan Rancangan Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang sampai dengan triwulan II tahun 2025
  3. Perumusan rancangan akhir
    - Penyempurnaan rancangan perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang tahun 2025
    - Diverifikasi oleh Bappeda
  4. Penetapan
    - Bersama dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2025, berdasarkan Peraturan Perundang – undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pereturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasiikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
  14. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Kabupaten Pematang Tahun 2009 Nomor 1);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2018-2038;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2013 Nomor 9);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021 Nomor 6);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 13);
  20. Peraturan Bupati Pematang Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang;
  21. Peraturan Bupati Pematang Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2024 Nomor 14);

22. Peraturan Bupati Pematang Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2025 Nomor 12);.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai pedoman penyusunan perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang tahun 2025 adalah untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi makro sehingga tercipta sinergi dalam pepenyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah dan menciptakan efisiensi akokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyusunan dokumen perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan;
2. Bab II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025, berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025, faktor-faktor penyebab status capaian kinerja sangat rendah dan rendah;
3. Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang, berisi tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta kerangka pendanaan perubahan Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang;
4. Bab V Penutup, berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Tahun 2025.

## BAB II

### EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dinpusarda) Kabupaten Pemalang merupakan instansi pemerintah yang menjalankan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan. Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Dinpusarda mempunyai 2 (dua) tujuan jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2021-2026, yaitu **“Meningkatkan Budaya Literasi di Masyarakat”** yang diukur dengan indikator **nilai budaya literasi** dengan rumusan rerata dari persentase penduduk yang membaca baik cetak maupun elektronik, persentase penduduk yang mengakses internet, dan persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/taman baca masyarakat. Tujuan yang kedua yaitu **“Meningkatkan birokrasi akuntabel”** yang diukur dengan indikator **indeks kearsipan** yang merupakan penilaian dari ANRI meliputi pengawasan kearsipan eksternal dan kearsipan internal.

Sasaran jangka menengah Dinpusarda Kabupaten Pemalang yang akan dicapai selama tahun 2021-2026 diantaranya adalah :

1. **“Meningkatnya Budaya Literasi di Masyarakat”** yang diukur dengan **indikator indeks pembangunan literasi masyarakat**. Unsur pembangunan literasi masyarakat, meliputi pemerataan, layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat/hari, jumlah perpustakaan ber-SNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan dan anggota perpustakaan.
2. **“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan”** yang diukur dengan indikator **persentase OPD yang mampu mengelola arsip dengan baik** dengan rumusan jumlah OPD yang mampu mengelola arsip dengan baik dibagi jumlah OPD dikali 100%
3. **“Meningkatnya Pelayanan Kinerja Dinpusarda”** yang diukur dengan indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** terhadap kinerja Dinpusarda yang diperoleh dari hasil survei kepuasan kepada pengunjung perpustakaan.

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran/tujuan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran capaian kinerja adalah proses

penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja maka sub kegiatan, kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan dengan menghitung realisasi kinerja dan anggaran dibandingkan dengan targetnya. Berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 status capaian kinerja dan anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Status Capaian Kinerja dan Anggaran

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Status
1	47,50% ≤	Sangat tinggi (ST)
2	38,76% ≤ 47,50%	Tinggi (T)
3	31,26 ≤ 38,75%	Sedang (S)
4	22,51% ≤ 31,25%	Rendah (R)
5	≤ 22,50%	Sangat Rendah (SR)

Pada APBD Penetapan Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2025 Dinpusarda mendapat alokasi anggaran penetapan sebesar Rp7.771.343.100 untuk membiayai 5 program dan 13 kegiatan serta 47 sub kegiatan. Terdiri dari anggaran Belanja Barang dan Jasa sebanyak Rp. 4.133.046.100 Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.387.454.000, Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 46.593.000 dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 204.250.000.

Realisasi anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2025 sebesar Rp. 2.422.995.092 atau sebesar 31,61% dari total anggaran 2025. Penyerapan anggaran sebesar 31,61% masuk pada kategori Sedang (S). Sedangkan realisasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar 43,29%. Realisasi kinerja sebesar 43,29% tersebut masuk pada kategori tinggi (T).

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan triwulan II dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisa pelaksanaan program,

kegiatan maupun sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Jaya. Berikut ini disajikan tabel hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinpusarda Kabupaten Pematang Jaya Triwulan II Tahun 2025 secara lebih rinci hingga sub kegiatan sebagai berikut.

Tabel 2.2.

## Evaluasi Renja Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan II Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran (Tahun n 2025)						Realisasi Kinerja Anggaran Renja OPD pada Triwulan I (Tahun 2025)										Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD (Tahun 2025)		Status Capaian		Keterangan	
			Penetapan		Efisiensi/ Pergeseran/ Perubahan		Selisih		I		II		III		IV		Total		(12 = 9/4*100)		13			
			4	5	6	7	8	9	10	(11 = 7+8+9+10)		(12 = 9/4*100)		14										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		K		Rp		K	Rp		
		Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			11.542	7.771.343.100	11.542	7.665.734.100	0	105.609.000	1.585	1.176.755.538	3.411	1.246.239.554		0		0	4.996	2.422.995.092	43,29	31,61	T	S	Realisasi Keuangan masih dalam proses penyusunan SPJ
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			39	7.415.018.600	39	7.394.593.260	0	20.425.340	14	1.151.172.518	11	1.228.143.104		0		0	26	2.379.315.622	65,38	32,18	ST	S	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	%	65,40	3.300.543.980	65,40	3.300.543.980	0,00	0	0,00	165.516.409	0,00	388.727.404		0		0	0,00	554.243.813	0,00	16,79	SR	SR	Perhitungan capaian kinerja dilaksanakan pada TW IV
		Persentase Perpustakaan Terstandarisasi	Skor	10,00		10,00		0,00		0,00		0,00					0,00			0,00		SR		Perhitungan capaian kinerja dilaksanakan pada TW IV
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				879.719.280		879.719.280	0	0		71.764.336		271.887.345		0		0		343.651.681		39,06		T	Realisasi Keuangan masih dalam proses penyusunan SPJ
	Keluaran Kegiatan	Jumlah perpustakaan tingkat daerah yang tersedia	unit	1		1				0,13		0,87						1		100,00		ST		
	Hasil Kegiatan	Persentase perpustakaan tingkat daerah yang dikelola	%	100		100				13		87						100		100,00		ST		

2.23.02.2 .01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	15	15.000.000	15	15.000.000	0	0	0	0	8	0				8	0	53,33	0,00	ST	SR	Realisasi Keuangan masih dalam proses penyusunan SPJ
2.23.02.2 .01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Perpustakaan	15	50.000.000	15	50.000.000	0	0	0	0	0	400.000				0	400.000	0,00	0,80	SR	SR	Kegiatan dilaksanakan pada TW III
2.23.02.2 .01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Layanan	5	296.825.680	5	296.825.680	0	0	0,13	71.764.336	2,87	44.019.080				3	115.783.416	60,00	39,01	ST	T	
2.23.02.2 .02.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Perpustakaan	10	10.445.520	10	10.445.520	0	0	0	0	0	0				0	0	0,00	0,00	SR	SR	Kegiatan dilaksanakan pada TW III

2.23.02.2 .01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	40	220.531.320	40	220.531.320	0	0	0	0	40	84.972.681				40	84.972.681	100,00	38,53	ST	S	Realisasi Keuangan masih dalam proses penyusunan SPJ
2.23.02.2 .01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	Dokumen	5	33.416.760	5	33.416.760	0	0	0	0	1	0				1	0	20,00	0,00	SR	SR	Masih dalam proses pendataan perpustakaan
2.23.02.2 .01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	1.500	186.200.000	1.500	186.200.000	0	0	0	0	1848	142.495.584				1.848	142.495.584	123,20	76,53	ST	ST	
2.23.02.2 .01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	Perpustakaan	2	67.300.000	2	67.300.000	0	0	0	0	1	0				1	0	50,00	0,00	ST	SR	Realisasi Keuangan masih dalam proses penyusunan SPJ
<b>2.23.02.2.02</b>	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah</b>				<b>2.420.824.700</b>		<b>2.420.824.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>93.752.073</b>		<b>116.840.059</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>210.592.132</b>		<b>8,70</b>		<b>SR</b>	<b>Realisasi Keuangan masih dalam proses penyusunan SPJ</b>
	<b>Keluaran Kegiatan</b>	<b>jumlah aktivitas pembudayaan gemar membaca</b>	<b>kegiatan</b>	<b>5</b>		<b>5</b>			<b>0</b>			<b>1</b>					<b>1</b>		<b>20,00</b>		<b>SR</b>		<b>Kegiatan dilaksanakan pada TW III</b>
	<b>Hasil Kegiatan</b>	<b>Persentase capaian aktivitas pembudayaan gemar membaca dibanding target pada tahun berkenaan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>			<b>0</b>			<b>20</b>					<b>20</b>		<b>20,00</b>		<b>SR</b>		<b>Kegiatan dilaksanakan pada TW III</b>

2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Duta Baca / Bunda Baca / Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	Orang	1	44.875.380	1	44.875.380	0	0	0	0	1	2.449.670				1	2.449.670	100,00	5,46	ST	SR	Realisasi Keuangan masih dalam proses penyusunan SPJ
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi berbasis inklusi sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Perpustakaan	4	92.690.540	4	92.690.540	0	0	0	0	0	0				0	0	0,00	0,00	SR	SR	Kegiatan dilaksanakan pada TW III
2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang menjadi kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah sarana perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan	1	1.850.000.000	1	1.850.000.000	0	0	0	92.764.073	0	7.747.200				0	100.511.273	0,00	5,43	SR	SR	Kegiatan dilaksanakan pada TW III
2.23.02.2.02.0009	Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang	170	231.165.700	170	231.165.700	0	0	0	988.000	0	106.643.189				0	107.631.189	0,00	46,56	SR	T	Kegiatan dilaksanakan pada TW III
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Lokus	1	202.093.080	1	202.093.080	0	0	0	0	0	0				0	0	0,00	0,00	SR	SR	Kegiatan dilaksanakan pada TW III
2.23.03	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	<b>Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis</b>	%	2	39.456.320	2	39.456.320	0	0	0	0		4.227.000			0	0	4.227.000	0,00	10,71	SR	SR	Perhitungan capaian kinerja dilaksanakan pada TW IV
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kab/Kota				39.456.320		39.456.320	0	0		0		4.227.000			0	0	4.227.000		10,71		SR	Realisasi Keuangan masih dalam proses penyusunan SPJ
	Keluaran Kegiatan	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan	naskah	1		1				0		1					1		100,00		ST		
	Hasil Kegiatan	Persentase naskah kuno yang dilestarikan	%	100		100				0		100					100		100,00		ST		

2.23.03.2 .01.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	2	39.456.320	2	39.456.320	0	0	0	0	2	4.227.000				2	4.227.000	100,00	10,71	ST	SR	Realisasi Keuangan masih dalam proses penyusunan SPJ
2.23.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>Skor</b>	<b>64,00</b>	<b>4.075.018.300</b>	<b>64,00</b>	<b>4.054.592.960</b>	<b>0</b>	<b>20.425.340</b>	<b>0,00</b>	<b>985.656.109</b>		<b>835.188.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.844.809</b>	<b>0,00</b>	<b>44,91</b>	<b>SR</b>	<b>T</b>	<b>Capaian Indikator Nilai SAKIP pada TW III</b>	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				27.500.000		20.651.444	0	6.848.556		3.919.395		2.748.500	0	0		6.667.895		32,29		S	Realisasi Keuangan masih dalam proses penyusunan SPJ	
	Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	dokumen	11		11			4		0,5					5		40,91		T			
	Hasil Kegiatan	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel dan tepat waktu	%	100		100			36,36 364		4,55					41		40,91		T			
2.23.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	10.325.000	3	6.743.144	0	3.581.856	0	403.040	-	1.523.500			0	1.926.540	0,00	28,57	SR	Rp	Masih dalam proses penyusunan	
2.23.01.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.000.000	1	2.559.060	0	440.940	1	835.100	-	0			1	835.100	100,00	32,63	ST	S	Realisasi Keuangan masih dalam proses penyusunan SPJ	
2.23.01.2 .01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.000.000	1	2.541.240	0	458.760	0	0	-	0			0	0	0,00	0,00	SR	SR	Kegiatan dilaksanakan pada TW III	
2.23.01.2 .01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	2.000.000	1	1.530.680	0	469.320	1	1.153.105	-	0			1	1.153.105	100,00	75,33	ST	ST		

2.23.01.2 .01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	2.675.000	1	2.102.540	0	572.460	0	0	-	0				0	0	0,00	0,00	SR	SR	Kegiatan dilaksanakan pada TW III
2.23.01.2 .01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3.500.000	3	2.892.680	0	607.320	3	1.528.150	-	1.225.000				3	2.753.150	100,00	95,18	ST	ST	
2.23.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	3.000.000	1	2.282.100	0	717.900	0	0	0,50	0				0,50	0	50,00	0,00	ST	ST	Realisasi Keuangan masih dalam proses penyusunan SPJ
<b>2.23.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>3.392.954.000</b>		<b>3.391.946.060</b>	<b>0</b>	<b>1.007.940</b>		<b>852.552.531</b>		<b>729.011.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.581.563.625</b>		<b>46,63</b>		<b>T</b>		<b>Realisasi Keuangan masih dalam proses penyusunan SPJ</b>
	<b>Keluaran Kegiatan</b>	<b>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun</b>	<b>laporan</b>	<b>6</b>		<b>6</b>				<b>1</b>		<b>2</b>					<b>3</b>		<b>50,00</b>		<b>ST</b>		
	<b>Hasil Kegiatan</b>	<b>Presentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>				<b>16,66</b>		<b>33,33</b>					<b>50</b>		<b>50,00</b>		<b>ST</b>		
2.23.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	19	3.387.454.000	19	3.387.454.000	0	0	18	852.054.031	21	728.916.594				21	1.580.970.625	110,53	46,67	ST	T	
2.23.01.2 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1	3.000.000	1	2.482.380	0	517.620	0	498.500	0,5	0				1	498.500	50,00	20,08	ST	SR	Realisasi Keuangan masih dalam proses penyusunan SPJ

2.23.01.2 .02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	4	1.000.000	4	728.380	0	271.620	1	0	1	94.500				2	94.500	50,00	12,97	ST	SR	Realisasi Keuangan masih dalam proses penyusunan SPJ
2.23.01.2 .02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen	1	1.500.000	1	1.281.300	0	218.700	0	0	0	0				0	0	0,00	0,00	SR	SR	Kegiatan dilaksanakan pada TW III
<b>2.23.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>500.000</b>		<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>SR</b>	<b>Kegiatan dilaksanakan pada TW III</b>
	<b>Keluaran Kegiatan</b>	<b>Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas</b>	<b>Orang</b>	<b>1</b>		<b>1</b>				<b>0</b>		<b>0</b>					<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>SR</b>		<b>Kegiatan dilaksanakan pada TW III</b>
	<b>Hasil Kegiatan</b>	<b>Persentase pegawai yang meningkat kapasitasnya</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>				<b>0</b>		<b>0</b>					<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>SR</b>		<b>Kegiatan dilaksanakan pada TW III</b>
2.23.01.2 .05.0010	Sosialisasi Peraturan perundang undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Orang	1	500.000	1	350.000	0	150.000	0	0	0	0				0	0	0,00	0,00	SR	SR	Kegiatan dilaksanakan pada TW III
<b>2.23.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>89.532.900</b>		<b>77.114.056</b>	<b>0</b>	<b>12.418.844</b>		<b>13.458.560</b>		<b>4.241.050</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>17.699.610</b>		<b>22,95</b>		<b>Rp</b>	<b>Realisasi Keuangan masih dalam proses penyusunan SPJ</b>
	<b>Keluaran Kegiatan</b>	<b>jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia</b>	<b>layanan</b>	<b>8</b>		<b>8</b>				<b>5</b>		<b>2</b>					<b>7</b>		<b>87,50</b>		<b>ST</b>		
	<b>Hasil Kegiatan</b>	<b>Presentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>				<b>62,5</b>		<b>25</b>					<b>88</b>		<b>87,50</b>		<b>ST</b>		

2.23.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/peneranga n bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	1.000.000	12	1.000.000	0	0	3	90.000	3	566.000				6	656.000	50,00	65,60	ST	ST	
2.23.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	45.000.000	12	45.000.000	0	0	3	4.837.500	3	0				6	4.837.500	50,00	10,75	ST	SR	Realisasi Keuangan masih dalam proses penyusunan SPJ
2.23.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	5.000.000	12	5.000.000	0	0	3	0	3	1.669.590				6	1.669.590	50,00	33,39	ST	S	Realisasi Keuangan masih dalam proses penyusunan SPJ
2.23.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	13.532.900	12	10.311.400	0	3.221.500	3	1.679.560	3	1.113.460				6	2.793.020	50,00	27,09	ST	R	Realisasi Keuangan masih dalam proses penyusunan SPJ
2.23.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.050.000	0	450.000	3	0	3	0				6	0	50,00	0,00	ST	SR	Realisasi Keuangan masih dalam proses penyusunan SPJ
2.23.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	Dokumen	12	2.500.000	12	2.500.000	0	0	3	420.000	3	892.000				6	1.312.000	50,00	52,48	ST	ST	
2.23.01.2 .06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	1.000.000	12	700.000	0	300.000	3	0	3	0				6	0	50,00	0,00	ST	SR	Menyesuaikan dengan kebutuhan
2.23.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	20.000.000	12	11.552.656	0	8.447.344	3	6.431.500	3	0				6	6.431.500	50,00	55,67	ST	ST	
<b>2.23.01. 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>564.231.400</b>		<b>564.231.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>115.625.623</b>		<b>99.088.366</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>214.713.989</b>		<b>38,05</b>		<b>S</b>	<b>Realisasi Keuangan masih dalam proses penyusunan SPJ</b>
	<b>Keluaran Kegiatan</b>	<b>jumlah ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia</b>	<b>jasa</b>	<b>3</b>		<b>3</b>				<b>3</b>		<b>3</b>					<b>6</b>		<b>200,0 0</b>		<b>ST</b>		
	<b>Hasil Kegiatan</b>	<b>Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlanar pelaksanaan tugas</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>				<b>100</b>		<b>100</b>					<b>200</b>		<b>200,0 0</b>		<b>ST</b>		

2.23.01.2 .08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	100.000	12	100.000	0	0	3	100.000	3	0				6	100.000	50,00	100,00	ST	ST	
2.23.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	220.047.400	12	220.047.400	0	0	3	30.194.623	3	19.811.866				6	50.006.489	50,00	22,73	ST	R	
2.23.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	344.084.000	12	344.084.000	0	0	3	85.331.000	3	79.276.500				6	164.607.500	50,00	47,84	ST	ST	
<b>2.23.01. 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>300.000</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100.000</b>		<b>99.690</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>199.690</b>		<b>66,56</b>		<b>ST</b>	
	<b>Keluaran Kegiatan</b>	<b>jumlah barang milik daerah yang terpelihara</b>	<b>unit</b>	<b>3</b>		<b>3</b>				<b>1</b>		<b>1</b>					<b>2</b>		<b>66,67</b>		<b>ST</b>		
	<b>Hasil Kegiatan</b>	<b>Presentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>				<b>33,33 333</b>		<b>33,33</b>					<b>67</b>		<b>66,67</b>		<b>ST</b>		
2.23.01.2 .09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	100.000	1	100.000	0	0	0	0	0	0				0	0	0,00	0,00	SR	SR	Realisasi Keuangan masih dalam proses penyusunan SPJ
2.23.01.2 .09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	100.000	1	100.000	0	0	0	0	1	99.690				1	99.690	100,00	99,69	ST	ST	
2.23.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	100.000	1	100.000	0	0	1	100.000	0	0				1	100.000	100,00	100,00	ST	ST	
<b>2.24</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan</b>			<b>11.503</b>	<b>356.324.500</b>	<b>11.503</b>	<b>271.140.840</b>	<b>0</b>	<b>85.183.660</b>	<b>1.571</b>	<b>25.583.020</b>	<b>3.400</b>	<b>18.096.450</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.679.470</b>	<b>0,00</b>	<b>16,11</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>	<b>Perhitungan capaian kinerja dilaksanakan pada TW IV</b>

2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	%	70,44	351.324.500	70,44	266.307.940	0,00	85.016.560	0,00	25.583.020		17.855.650	0	0	0,00	43.438.670	0,00	16,31	SR	SR	Perhitungan capaian kinerja dilaksanakan pada TW IV
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				202.780.000		157.165.550	0	45.614.450		14.966.820		16.160.650	0	0		31.127.470		19,81		SR	Realisasi Keuangan masih dalam proses penyusunan SPJ
	Keluaran Kegiatan	jumlah arsip dinamis yang terkelola	berkas	7.501		7.501				791		3026				3.817		50,89		ST		
	Hasil Kegiatan	Presentase arsip dinamis yang terkelola	%	100		100				10,54 526		40,34				51		50,89		ST		
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas	1	25.380.000	1	15.304.050	0	10.075.950	0	0	1	2.810.030			1	2.810.030	100,00	18,36	ST	SR	Realisasi Keuangan masih dalam proses penyusunan SPJ
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	7.500	142.000.000	7.500	120.676.600	0	21.323.400	791	14.966.820	3025	12.707.900			3.816	27.674.720	50,88	22,93	ST	R	Realisasi Keuangan masih dalam proses penyusunan SPJ
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	41	35.400.000	41	21.184.900	0	14.215.100	0	0	41	642.720			41	642.720	100,00	3,03	ST	SR	Realisasi Keuangan masih dalam proses penyusunan SPJ
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota				40.000.000		23.507.640	0	16.492.360		10.616.200		0	0	0		10.616.200		45,16		T	
	Keluaran Kegiatan	jumlah arsip statis yang terkelola	arsip	3.000		3.000				780		220				1.000		33,33		ST		
	Hasil Kegiatan	Presentase arsip statis yang terkelola	%	100,00		100,00				26		7,33				33		33,33		ST		
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	3.000	40.000.000	3.000	23.507.640	0	16.492.360	780	10.616.200	220	0			1.000	10.616.200	33,33	45,16	ST	T	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota				108.544.500		85.634.750	0	22.909.750		0		1.695.000	0	0		1.695.000		1,98			
	Keluaran Kegiatan	jumlah aktivitas pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan	kegiatan	2		2				0		50				50		2.500,00		ST		
	Hasil Kegiatan	Presentase aktivitas pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan	%	100		100				0		50				50		50,00		ST		

2.24.02.2 .03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	10	23.119.500	10	13.407.250	0	9.712.250	0	0	5	1.695.000				5	1.695.000	50,00	12,64	ST	SR	Realisasi Keuangan masih dalam proses penyusunan SPJ
2.24.02.2 .03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	2	85.425.000	2	72.227.500	0	13.197.500	0	0	0	0				0	0	0,00	0,00	SR	SR	Kegiatan dilaksanakan pada TW III dan IV
<b>2.24.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	<b>Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban</b>	%	<b>16,67</b>	<b>5.000.000</b>	<b>16,67</b>	<b>4.832.900</b>	<b>0</b>	<b>167.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.800</b>				<b>0</b>	<b>240.800</b>	<b>0,00</b>	<b>4,98</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>	<b>Realisasi Keuangan masih dalam proses penyusunan SPJ</b>
2.24.03. 2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun				5.000.000		4.832.900	0	167.100		0		240.800					240.800		4,98	SR	SR	Realisasi Keuangan masih dalam proses penyusunan SPJ
	Keluaran Kegiatan	jumlah arsip retensi dibawah 10 tahun yang dimusnahkan	arsip	1.000		1.000				0		103,9						104		10,39			Kegiatan dilaksanakan pada TW III dan IV
	Hasil Kegiatan	Presentase arsip retensi dibawah 10 tahun yang dimusnahkan	%	100		100				0		103,9						104		103,90			
2.24.03.2 .01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip	1.000	5.000.000	1.000	4.832.900	0	167.100	0	0	1.039	240.800				1.039	240.800	103,90	4,98	SR		Kegiatan dilaksanakan pada TW III dan IV

Berdasarkan tabel 2.2 masih terdapat sub kegiatan yang menunjukkan status capaian kinerja dan keuangan SR dan R. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Rencana pelaksanaan yang memang dijadwalkan pada triwulan III dan IV tahun 2025. Sub Kegiatan tersebut yaitu :
  - a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
  - c. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
  - d. Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan
  - e. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - f. Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
  - g. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
  - h. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - i. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
  - j. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat.
  - k. Pemberdayaan Kapasitas Umit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah
  - l. Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Dibawah 10 (Sepuluh) Tahun.
2. Sudah dilaksanakan namun tertunda administrasi keuangannya karena SPJ Pengeluaran GU masih dalam proses pengentry an di aplikasi SIPD Penatausahaan, Sub kegiatan tersebut yaitu :
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - d. Koordinasi dan Penyusunan Lapoan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
  - e. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - f. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - h. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - i. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis

- j. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
  - k. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
  - l. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi. Dan Akses Arsip Statis
  - m. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN
3. Rencana pelaksanaan dijadwalkan pada triwulan II akan tetapi dikarenakan masih dalam proses e-purchasing dan proses tender pada aplikasi LPSE maka pelaksanaan diundur pada awal triwulan III
- a. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Beberapa sub kegiatan yang proses pengerjaannya dimulai dari triwulan II namun akan selesai pada triwulan III :
- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan selanjutnya akan dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Melakukan pemberdayaan SDM secara optimal untuk dapat membantu mendukung pelaksanaan pencapaian target kinerja
2. Melakukan percepatan proses administrasi keuangan.
3. Membuat *timeline schedule* daftar target yang harus dicapai per triwulan agar kegiatan dapat berjalan dengan optimal.

Untuk evaluasi indikator kinerja utama perangkat daerah, indikator kinerja program serta anggaran program sampai triwulan II tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.

## Evaluasi Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Pematang Sari Triwulan II Tahun 2025

Program	Indikator	Satuan	Target Akhir 2026	Capaian 2024	Target 2025	Total Anggaran Tahun 2025	Realisasi										Capaian (%)		Status Capaian	Keterangan
							TW I		TW II		TW III		TW IV		TOTAL		K	Rp		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
IKU	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	55,40	45,12	55,00		0		0						0		0		SR	Nilai diperoleh pada TW IV
	Indeks kearsipan	Indeks	60,70	50,94	58,320		0		0						0		0		SR	Nilai diperoleh pada TW IV
	Persentase OPD yang mampu mengelola arsip dengan baik	%	100,00	100	100,00		0		0						0		0		SR	Nilai diperoleh pada TW IV
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,00	85,046	85,10		0		0						0		0		SR	Nilai diperoleh pada TW IV
	Nilai SAKIP	Nilai	66,00	63,89	64,00		0		0						0		0		SR	Nilai diperoleh pada TW IV
IKK	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	66,65	65,25	65,40		0		0						0		0		SR	Nilai diperoleh pada TW IV
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	55,40	45,12	53,100		0		0						0		0		SR	Nilai diperoleh pada TW IV

	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional. Pasal 40 dan pasal 59 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	73,06	67,82	89,00		0		0					0		0		SR	Nilai diperoleh pada TW IV	
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	35,00	33,34	33,33		0		0					0		0		SR	Nilai diperoleh pada TW IV	
URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			11.542	7.665.734.100	11.542	7.665.734.100	1.585	1.176.755.538	3.411	1.246.239.554		0		0	4.996	2.422.995.092	43,29	31,61	T	S

URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERPUSTAKA AN					39	7.394.59 3.260	14	1.151.17 2.518	11	1.228.14 3.104		0		0	26	2.379. 315.62 2	65, 38	32,18	ST	S
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKA AN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	%			65,40	3.300.54 3.980	0,0 0	165.516. 409	0,0 0	388.727. 404		0		0	0,00	554.24 3.813	0,0 0	16,79	SR	SR
	Persentase Perpustakaan Terstandarisa si	Skor			10,00		0,0 0		0,0 0						0,00		0,0 0		SR	
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis	%			2	39.456.3 20	0	0		4.227.00 0		0		0	0	4.227. 000	0,0 0	10,71	SR	SR
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP	Skor			64,00	4.054.59 2.960	0,0 0	985.656. 109		835.188. 700		0		0	0,00	1.820. 844.80 9	0,0 0	44,91	SR	T
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan					11.503	271.140. 840	1.5 71	25.583.0 20	3.4 00	18.096.4 50		0		0	0	43.679 .470	0,0 0	16,11	SR	SR
PROGRAM PENGELOLAA N ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	%			70,44	266.307. 940	0,0 0	25.583.0 20		17.855.6 50		0		0	0,00	43.438 .670	0,0 0	16,31	SR	SR

Berdasarkan tabel 2.3 masih terdapat indikator yang menunjukkan status capaian kinerja dan keuangan SR dan R Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Rencana pelaksanaan yang memang dijadwalkan pada triwulan III dan IV tahun 2024. Indikator tersebut yaitu :
  - a. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
  - b. Indeks Kearsipan
  - c. Persentase OPD yang mampu mengelola arsip dengan baik
  - d. Indeks Kepuasan Masyarakat
  - e. Nilai SAKIP
  - f. Tingkat Ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja
  - g. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat

Untuk meningkatkan capaian berbagai indikator kinerja, perlu dilakukan upaya secara terintegrasi dan berkesinambungan. Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dilakukan melalui perluasan akses layanan perpustakaan baik fisik maupun digital, penambahan dan pembaruan koleksi yang relevan, serta pelaksanaan program literasi berkelanjutan dengan melibatkan sekolah, komunitas, dan pihak swasta. Dalam bidang kearsipan, peningkatan Indeks Kearsipan, persentase OPD yang mampu mengelola arsip dengan baik, serta tingkat ketersediaan, keberadaan, dan keutuhan arsip ditempuh melalui penguatan kebijakan dan tata kelola arsip sesuai ketentuan ANRI, pembentukan unit kearsipan di OPD, bimbingan teknis dan pendampingan, penyediaan sarana prasarana yang memadai, digitalisasi arsip, serta audit dan pengawasan berkala untuk menjamin autentisitas, keutuhan, dan keamanan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban publik. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat ditempuh melalui peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan, percepatan akses layanan berbasis digital, peningkatan kompetensi dan sikap petugas, serta penyediaan sarana prasarana yang nyaman dan inklusif disertai tindak lanjut atas saran dan keluhan masyarakat. Sementara itu, untuk mendukung perbaikan nilai SAKIP, diperlukan penguatan perencanaan berbasis kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan dan pelaporan, peningkatan kualitas pengukuran kinerja dan pemanfaatan data, serta pelatihan teknis bagi

pejabat dan staf perencana. Seluruh langkah tersebut dilakukan secara sinergis agar target kinerja urusan perpustakaan dan kearsipan dapat tercapai optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah memuat 5 program, 13 kegiatan dan 47 sub kegiatan yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
    - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
    - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
    - d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
  - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - a. Sosialisasi Peraturan Perundang undangan
  - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
    - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
    - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pembinaan Perpustakaan
- 1) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- a. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
  - b. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - c. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
  - d. Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
  - e. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - f. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - g. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
  - h. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
- 2) Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- a. Pemilihan Duta Baca tingkat Daerah Kab/Kota
  - b. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
  - c. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - d. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
  - e. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
- 1) Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
- a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan Perawatan Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno
4. Program Pengelolaan Arsip
- 1) Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
- b. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
- c. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2) Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
- 3) Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat
  - a. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN
  - b. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
- 5. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
  - 1) Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
    - a. Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun

Pada Tahun 2025, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendapatkan tambahan alokasi anggaran perubahan sebesar Rp.982.084.000 dengan rincian sebagai berikut :

1. Sumber dana DAU Bidang Pendidikan sejumlah Rp. 750.000.000 dialokasikan untuk memenuhi sarpras pada layanan bidang perpustakaan, diantaranya : Alat peraga edukasi (Puzzle Binatang Insecta, Laut, Peliharaan, dan 3 Dimensi, Mebel (Karpas, Kursi Pertemuan, Panggung Baca, Meja Baca Anak, Meja Baca Kelompok, Set Meja komputer Layanan, Meja Resepsionis, Bean Bag, Lemari Arsip, dan Rak Buku); Belanja Alat Rumah Tangga lainnya (Smart TV), Meja dan Kursi Tamu di ruang Pejabat, Sound System untuk Story telling, Standing Braket TV, Kamera, Balok Susun, Mesin Anjungan, Laptop, Komputer dan Printer. Selain itu tambahan anggaran juga dialokasikan untuk perpindahan ke gedung baru, launching gedung baru, perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi, penambahan pada kegiatan TPBIS, penambahan pada kegiatan Festival literasi, penambahan anggaran pada kegiatan wisata edukasi anak (layanan anak) dan penambahan anggaran pada kegiatan bimbingan teknis kepenulisan
2. Tambahan Anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak Rp. 67.693.000 diantaranya untuk tunjangan

pph dan tunjangan keluarga, sesuai dengan perhitungan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

3. Tambahan Anggaran sejumlah Rp. 70.000.000 (APBD Reguler) untuk menambah anggaran pada kegiatan operasional rutin pada sekretariat, diantaranya yaitu pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan dan mesin, pemeliharaan kendaraan, biaya pajak kendaraan, alat listrik, bahan pembersih, Jasa Iklan media masa, Rakor dan pembelian benda pos.
4. Tambahan Anggaran sejumlah Rp. 100.000.000 (APBD Reguler) yang dipergunakan untuk penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) Pembangunan Gedung Depo Arsip.
5. Tambahan Anggaran sejumlah Rp. 100.000.000 (APBD Reguler) yang dipergunakan untuk kegiatan sosialisasi Budaya Baca dan Literasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut. maka dapat diketahui pagu indikatif pada Anggaran Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang adalah Rp. 8.753.427.100. Selain terjadi penambahan dan pengurangan anggaran, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang juga melakukan beberapa pergeseran pada beberapa sub kegiatan, adapun rekapitulasi perubahan anggaran dan pergeseran anggaran tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada Perubahan APBD Kabupaten Pemalang  
Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Renstr ra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesuda h	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																	9.945.609.930		
																	9.945.609.930		
2	23																9.280.609.930		
2	23	01															5.520.609.930		
2	23	01	2.0 1														76.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	2.0 1	000 1															
																	19.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	2.0 1	000 2															

						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	3.000.000	2.559.060	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			8.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000	3.000.000	2.541.240	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			8.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	2.000.000	2.530.680	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			8.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000	2.675.000	2.602.540	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			8.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	8.000.000	3.500.000	2.892.680	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			7.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	14.000.000	3.000.000	2.282.100	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			18.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	-			100 %	100 %	3.094.008.000	3.392.954.000	3.392.954.000			-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Meningkatnya pelayanan kinerja dipusrd		3.632.102.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	21 Orang/bulan	3.079.668.000	3.387.454.000	3.455.147.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			3.485.102.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000	3.000.000	2.482.380	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			8.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2	23	01	2.0 2	000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3.340.000	1.000.000	728.380	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			134.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.0 2	000 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000	1.500.000	1.281.300	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			5.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase pegawai yang meningkatkan kapasitasnya	-		100 %	100 %	0	500.000	500.000			-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Meningkatnya pelayanan kinerja dipusarda		50.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.0 5	001 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	1 Orang	0	500.000	350.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			50.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase ketersediaan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas	-		100 %	100 %	0	89.532.900	89.532.900			-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Meningkatnya pelayanan kinerja dipusarda		505.843.300	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2	23	01	2.0 6	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0	1.000.000	6.100.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			8.990.900	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.0 6	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0	45.000.000	45.500.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			149.172.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.0 6	000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0	5.000.000	10.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			20.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.0 6	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0	13.532.900	45.881.500	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			96.928.300	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0	1.500.000	17.791.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			20.752.100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	0	2.500.000	5.500.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			20.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu																
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				-	12 Laporan	0	1.000.000	700.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			10.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0	20.000.000	58.552.656	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			180.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	-		100 %	100 %	0	0	0			-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Meningkatnya pelayanan kinerja dipusarda		350.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			200.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																

						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			150.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	-			100 %	100 %	564.064.000	564.231.400	564.231.400			-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Meningkatnya pelayanan kinerja dinpusarda		515.600.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0	100.000	1.100.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			6.600.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	220.000.000	220.047.400	178.047.400	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			150.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	344.064.000	344.084.000	322.834.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-				359.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	-			100 %	100 %	0	300.000	300.000			-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Meningkatnya pelayanan kinerja dinpusarda		391.064.630	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

2	23	01	2.0 9	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
										26 Unit	25 Unit	0	100.000	34.100.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			120.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	2.0 9	000 5	Pemeliharaan Mebel																		
										15 Unit	15 Unit	0	0	0	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			5.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	2.0 9	000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
										20 Unit	40 Unit	0	100.000	15.100.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			30.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	2.0 9	001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
										2 Unit	1 Unit	0	100.000	10.350.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Penguatan Fasilitas, Koordinasi dan Pengembangan Pembangunan Desa			236.064.630	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan terstandarisasi Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat				-	4,82 55,53 % skor	4.028.145.500	3.300.543.980	4.050.258.380								3.675.000.000	

2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase perpustakaan tingkat daerah yang dikelola	-			100 %	100 %	1.579.967.126	879.719.280	879.719.280			-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Meningkatnya budaya literasi masyarakat		1.270.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																	
					Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan					10 Perpustakaan	15 Perpustakaan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			25.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
					Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya					15 Perpustakaan	15 Perpustakaan	50.000.000	50.000.000	99.975.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			225.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.01	0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota																	
					Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi					5 Layanan	5 Layanan	662.088.206	296.825.680	301.820.680	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			420.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2	23	02	2.0 1	001 3	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota																
									10 Perpustak aan	10 Perpus takaan	10.445.520	10.445.520	10.445.520	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			20.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.0 1	001 6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
								40 Orang	330 Orang	468.591.000	220.531.320	240.965.720	Kab. Pemalang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			110.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	02	2.0 1	001 7	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan																
								5 Dokumen	5 Dokum en	30.927.400	33.416.760	33.416.760	Kab. Pemalang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			15.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	02	2.0 1	001 8	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																
								1500 Eksemplar	1500 Eksem plar	242.915.000	186.200.000	186.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			330.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																
					Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	100.000.000	67.300.000	67.300.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			125.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase capaian aktivitas pembudayaan gemar membaca dibanding dengan target tahun berkenaan	-		100 %	100 %	2.448.178.374	2.420.824.700	2.420.824.700			-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Meningkatnya budaya literasi di masyarakat		2.405.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
					Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				1 Orang	15 Orang	15.000.000	44.875.380	44.875.380	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			20.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																
					Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				4 Perpustakaan	5 Perpustakaan	105.000.000	92.690.540	112.808.540	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			157.250.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.02	0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																
					Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	2.148.178.374	1.850.000.000	2.520.192.000	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			2.000.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



						Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				2 Orang	2 Orang	20.000.000	39.456.320	39.456.320	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			20.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	03	2.01	0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan																	
					Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				2 Eksemplar	2 Eksemplar	8.000.000	0	0	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			20.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase koleksi budaya etnis nusantara yang dilestarikan	-			100 %	100 %	10.000.000	0	0			-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Meningkatnya budaya literasi di masyarakat		45.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	03	2.02	0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																	
					Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota				25 Eksemplar	1 Eksemplar	5.000.000	0	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			15.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	03	2.02	0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																	

						Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota				25 Eksemplar	1 Eksemplar	5.000.000	0	0	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			30.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							401.324.500	356.324.500	229.015.340									665.000.000	
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja				-	17,70 %	383.456.000	351.324.500	224.225.844								600.000.000		
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang terkelola	-			100 %	100 %	229.456.000	202.780.000	202.780.000			-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan		240.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																			
					Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan					1200 Berkas	2596 Berkas	84.000.000	25.380.000	9.125.460	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			50.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																			
					Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan					7500 Berkas	7500 Berkas	110.056.000	142.000.000	68.185.500	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			190.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																			

						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Laporan	41 Laporan	35.400.000	35.400.000	30.683.895	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Presentase arsip statis yang terkelola	-			100 %	100 %	40.000.000	40.000.000	40.000.000			-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan		95.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																	
						Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				3000 Arsip	3000 Arsip	40.000.000	40.000.000	28.007.739	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			95.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-			-	-	114.000.000	108.544.500	108.544.500			-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan		265.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																	
						Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				200 Pengguna	10 Pengguna	100.000.000	23.119.500	24.825.750	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			185.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																	

						Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	2 Laporan	14.000.000	85.425.000	63.397.500	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			80.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban				-	7,74 %	10.000.000	5.000.000	4.789.496							50.000.000	
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Presentase arsip retensi dibawah 10 tahun yang dimusnahkan	-			26 %	26 %	10.000.000	5.000.000	5.000.000			-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas penyelenggara kearsipan		35.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																	
					Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun					1500 Arsip	1000 Arsip	10.000.000	5.000.000	4.789.496	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			35.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala	Presentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan akibat bencana	-			100 %	100 %	0	0	0			-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas penyelenggara kearsipan		2.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



					Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				100 Arsip	100 Arsip	0	0	0	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			2.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03	2.03	0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan																
					Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan				100 Arsip	100 Arsip	0	0	0	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			2.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Presentase arsip statis yang diautentifikasi dan arsip hasil alih media	-		100 %	100 %	0	0	0			-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas penyelenggara kearsipan		5.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03	2.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip																
					Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan				100 Arsip	100 Arsip	0	0	0	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			2.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	03	2.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip																

						Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				0 Arsip	0 Arsip	0	0	0	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			2.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	-				-	-	7.868.500	0	0								15.000.000	
2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	persentase capaian penerbitan izin penggunaan arsip bersifat tertutup dibanding target yang ditentukan pada tahun berkenaan	-			100 %	100 %	7.868.500	0	0			-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan		15.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	04	2.01	0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																		
					Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan					2 SOP	2 SOP	7.868.500	0	0	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing				10.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	04	2.01	0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																		
					Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup					2 Arsip	1 Arsip	0	0	0	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing				5.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
												<b>J U M L A H</b>	<b>8.188.542.000</b>	<b>7.771.343.100</b>	<b>8.553.427.100</b>							<b>9.945.609.930</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2025 disusun sebagaimana rangkaian proses perencanaan daerah sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan Rencana Kerja ini sebagai bentuk adaptif terkait kebijakan pembangunan nasional, regional maupun daerah, sehingga diharapkan akan memudahkan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat mendesak dan penting untuk segera diimplementasikan, maka perubahan Rencana Kerja merupakan sesuatu hal yang bersifat mutlak untuk dilakukan.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 disusun sebagai bahan masukan di dalam perumusan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025. Plafon anggaran yang tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja merupakan hal yang masih bersifat asumptif dan prediktif, yang besarnya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan pendanaan program prioritas yang telah ditetapkan bersama.

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN PEMALANG



TANTRI ARI CAHYANINGTYAS, S.H., M.Si.  
NIP. 19700322 199403 2 003

**Formulir E.70**

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja Perangkat Daerah  
Kabupaten Pemalang  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	√			

Pemalang, Agustus 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



TANTRI ARI CAHYANINGTYAS, S.H., M.Si

Petunjuk Pengisian Formulir E.70:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.